



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPLS)**

---

Tahun Sidang : 2010 – 2011  
Masa Sidang : IV  
Rapat : Ke-  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Hari/Tanggal : Selasa, 7 Juni 2011  
Sifat : Terbuka  
Pukul : 10.15 WIB s.d 16.45 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)  
Acara : Pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN 2012  
Ketua Rapat : Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow  
Sekretaris : Dra. Hani Yuliasih  
Hadir Anggota : dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI  
Hadir Mitra : Menteri Perhubungan beserta jajaran terkait lainnya.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Ketua membuka rapat pukul 10.15 WIB, setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua menyampaikan agenda Rapat Kerja V DPR RI dengan Menteri Perhubungan pada hari ini adalah pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN 2012.
3. Ketua mempersilakan kepada Menteri Perhubungan untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

1. Komisi V DPR RI memahami program kegiatan yang telah disampaikan sesuai dengan SEB 189 1-MK 02-2011 dan hasil exercise pemutakhiran pagu serta mengakomodasi direktif Presiden RI, Pagu Indikatif Kementerian Perhubungan mendapatkan alokasi sebesar Rp 26,302 Trillun dari Total Kebutuhan Anggaran sesuai dengan Hasil Pembahasan dengan Dishub Provinsi dan UPT Daerah sebesar Rp 45,495 Trilliun. Selanjutnya Komisi V DPR RI dan Kementerian Perhubungan sepakat untuk memperjuangkan kenaikan pagu anggaran sesuai kebutuhan dalam rapat pembahasan di Badan Anggaran DPR RI dan diputuskan dalam pembahasan Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan.

2. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perhubungan dalam melanjutkan penyusunan RKA K/L 2012 dengan tetap mengedepankan keberlanjutan program dan skala prioritas yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan masukan/aspirasi Anggota Komisi V DPR RI.
3. Terkait terbatasnya kemampuan pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi, Komisi V DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan untuk mengajukan kepada Kementerian Keuangan agar dapat mengeluarkan Obligasi Khusus Infrastruktur Transportasi dan membuat kebijakan yang mendorong masuknya Investasi infrastruktur transportasi.
4. Komisi V DPR RI menegaskan kembali kepada Kementerian Perhubungan agar senantiasa meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia bidang transportasi antara lain dengan menambah jumlah serta melakukan pembinaan pada Pendidikan Kedinasan dan Pendidikan Swasta di bidang transportasi.
5. Komisi V DPR RI akan menindaklanjuti pembahasan dengan Kementerian Perhubungan untuk menetapkan RKA K/L 2012, setelah memperoleh hasil pembahasan dari Badan Anggaran, sesuai dengan siklus pembahasan anggaran di DPR RI.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.45 WIB.

Jakarta, 7 Juni 2011

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

**TTD**

**FREDDY NUMBERI**

**KETUA RAPAT,**

**TTD**

**YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW**